

TAK BERPENGARUH BAGI WARGA BANTUL

TPST Piyungan Dibuka dengan Kapasitas Terbatas

BANTUL (KR) - Setelah sebulan lebih ditutup, Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) di Piyungan Bantul mulai Selasa (5/9) dibuka kembali untuk kapasitas terbatas. Tapi Bantul tidak terpengaruh dengan dibukanya kembali TPST Piyungan. Karena Bantul memilih opsi mengolah sampah secara mandiri.

"Bantul tidak terpengaruh dengan dibukanya kembali TPST Piyungan. Karena kami memilih opsi mengolah sampah secara mandiri dan paripurna," ungkap Bupati Bantul H Abdul Halim Muslih kepada sejumlah wartawan di ruang kerjanya, kemarin.

Menurut Halim, Bantul sudah berketetapan untuk menyelesaikan masalah sampah di wilayah Bantul sendiri. Jadi rancangan sistem pengolahan sampah sudah mengarah kepada penyelesaian sampah di kalurahan-kalurahan.

"Maka kenapa lalu di setiap pedukuhan ada sistem pengolahan sampah. Dengan tersedianya anggaran Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Pedukuhan (P2BMP) sebesar Rp 50 juta per pedukuhan sebagian pemanfaatannya boleh untuk pengolahan sampah. Artinya Bantul sudah tidak mengandalkan menyeter sampah ke TPST di Piyungan," imbuhnya.

Lebih lanjut menurut Bupati, Bantul menuju penyelesaian sampah secara paripurna tahun 2025. "Nah perkara TPST



KR-Judiman

Kondisi TPST di Piyungan Bantul.

Piyungan dibuka kembali secara terbatas itu kewenangan Pemerintah DIY yang barangkali membuka ruang untuk kita maklum kota tidak ada tempat untuk pembuangan

sampah," tuturnya.

Gubernur sendiri sudah memerintahkan agar Bupati/Walikota supaya lebih mandiri dalam pengelolaan sampah. Maka di Bantul muncul regulasi diantaranya SK Bupati yang didalamnya menginstruksikan kepada kalurahan-kalurahan untuk melakukan refofusing APBDes untuk memastikan sistem pengelolaan sampah di tingkat kalurahan. Dengan itu sudah menuju penyelesaian yang permanen.

Kalurahan terdiri dari pedukuhan-pedukuhan yang sudah ada anggaran. Kalau sekenario ini berhasil berarti permasalahan sampah sudah selesai di tingkat kalurahan. Juga disarankan, setiap rumah membuat jugangan, seperti nenek moyang dahulu yang telah mencontohkan tentang penanganan sampah zaman dulu. (Jdm)-f

KESADARAN BELA NEGARA BAGI PERANGKAT DESA

Bangun Mental dan Karakter Bangsa



KR-Sukro Riyadi

Bupati Bantul H Abdul Halim Muslih menerima cinderamata dari Staf Ahli Menteri Pertahanan Bidang Ekonomi Kemenhan RI, Mayjen TNI Piek Budyakto.

BANTUL (KR) - Sosialisasi pembinaan kesadaran bela negara bagi perangkat desa di Kabupaten Bantul oleh Kementerian Pertahanan RI digelar, Selasa (5/9). Program tersebut diikuti lurah, jagabaya, pangrepto serta penewu. Kesadaran bela negara tidak hanya menjadi tugas TNI, pemerintah semata. Tapi juga tanggung jawab bersama sebagai warga negara Indonesia, termasuk perangkat desa sebagai garda depan.

"Semoga melalui sosialisasi ini akan terbentuk kader bela negara yang memiliki kemampuan andal dalam mengimplementasikan dan mengintegrasikan nilai dasar bela negara dalam sikap perilaku dan tindakan sehari-hari," ujar Bupati Bantul H Abdul Halim Muslih dalam acara pembukaan.

Acara tersebut hadir Kepala Bakesbangpol Kabupaten Bantul, Heru Wismantera SIP MM, Direktur Bela Negara Kemenhan RI, Brigjen TNI G Eko Sunarto, SPd MSi, Kasi Anev Subdit Lingja Dit Bela negara Ditjen Potan Kemenhan RI Letkol Kal Toto Istanto SE MSi.

Halim mengatakan, bela negara menjadi tanggung jawab seluruh warga, seluruh rakyat Indonesia. Artinya bukan hanya tanggung jawab TNI atau aparat pemerintah. "Melainkan tugas kita bersama untuk menjaga kedaulatan, keutuhan dan kea-

manan negara kita tercinta Republik Indonesia. Hal ini secara konstitusional tegas tertuang dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1 di mana dalam pasal tersebut tertulis hak dan kewajiban setiap warga negara untuk turut serta dalam upaya pembelaan pertahanan dan keamanan negara," ujar Halim.

Sosialisasi ini kata Halim, merupakan salah satu upaya kongrit untuk membangun kesadaran bela negara di tengah masyarakat khususnya di kalangan perangkat desa.

Staf Ahli Menteri Pertahanan Bidang Ekonomi Kemenhan RI, Mayjen TNI Piek Budyakto, mengatakan bela negara tidak menjadi tanggung jawab Kementerian Pertahanan dan TNI. Tapi menjadi tanggung jawab bersama seluruh Kementerian atau lembaga, termasuk pemerintah daerah serta seluruh komponen bangsa lainnya. Hal itu tertuang dalam pasal 27 ayat 3 UUD 1945. Bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. "Kegiatan sosialisasi pembinaan kesadaran bela negara ini merupakan bagian dari upaya untuk membangun sikap mental, karakter bangsa serta merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dari pembangunan revolusi mental," ujarnya. (Roy)-f

PELAYANAN HARUS CEPAT DAN PARIPURNA

Pemkab dan PN Bantul Jalin Kerja Sama

BANTUL (KR) - Pemerintah Kabupaten Bantul melakukan penandatanganan nota kesepakatan dan rencana kerja antara pemerintah Kabupaten Bantul dan Pengadilan Negeri Bantul serta penandatanganan rencana kerja antara Pemkab dan Polres Bantul, Senin (4/9).

Penandatanganan tersebut dilakukan langsung oleh Bupati Bantul H Abdul Halim Muslih di ruang kerjanya, Ketua PN Bantul Sunoto SH MH, Wakapolres Bantul Kumpul Ika Shanti Prihandini SIK MM.

Untuk rencana kerja ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bantul, Bambang Purwadi Nugroho SH MH dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Ir Sri Muryuwantini MM.

Bupati Bantul mengemukakan, kata kunci sinergi kolaborasi ini menemukan momentum yang tepat. Seiring tuntutan publik akan layanan yang cepat, dimana tuntutan Presiden RI agar pelayanan masyarakat harus cepat dan paripurna.

Sementara menurut Kabag Tata Pemerintahan Kabupaten Bantul, Roy Robert Edison Bonay AP MM, maksud kegiatan ini adalah untuk membangun komitmen bersama para pihak dalam melakukan sinergi penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bantul bersama dengan instansi vertikal yang ada di Kabupaten Bantul.

"Adapun tujuan kegiatan ini untuk mewujudkan sinergi, kolaborasi dalam penyelenggaraan pemerintah di Kabupaten Bantul," jelasnya.

Nota kesepakatan antara Pemkab dengan PN Bantul tentang penyelenggaraan urusan pemerintahan. Nota kesepakatan ditindaklanjuti dengan rencana kerja Pemkab Bantul. Dalam rencana kerja ini merupakan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tentang Pelayanan Terintegrasi Penerbitan Dokumen. Kependudukan bagi pengguna layanan setelah menerima putusan atau penetapan Pengadilan Negeri, juga Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Mall, Pelayanan Publik di Pemkab Bantul.

Kegiatan ini juga dilanjutkan dengan penandatanganan rencana kerja antara Pemerintah Kabupaten Bantul dan Polres Bantul tentang pelayanan Mall, pelayanan publik di Pemkab Bantul. (Jdm)-f

Kedaulatan Rakyat
EPAPER
www.kr.co.id

Berlangganan Scan Barcode

Harian Kedaulatan Rakyat juga hadir dalam format koran digital atau electronic paper (epaper). Sajian berita-berita Kedaulatan Rakyat dapat Anda nikmati melalui genggam tangan Anda. Sekarang.

DISAMBUT ANTUSIAS MASYARAKAT JCW Jadi Agenda Tahunan Kebanggaan Yogya



KR-Istimewa

Suasana Batista Experience dalam pameran JCW#3.

BANTUL (KR) - Keberadaan Jogja Coffee Week (JCW)#3 yang digelar dari 1 sampai 5 September mendapatkan sambutan positif dari masyarakat luas. Hal itu bisa dilihat dari antusias pengunjung yang sangat tinggi. Disamping kualitas dari peserta pameran yang lebih meningkat dengan brand-brand besar, juga Roastery yang sudah punya nama.

Adanya beberapa bean kopi (biji kopi) dengan kualitas, jarang ditemui dan

unik, seperti kopi tupai, kopi luwak, kopi wine dan lain lain dari seluruh Indonesia, secara tidak langsung menjadi daya tarik tersendiri.

"Transaksi dalam ajang Jogja Coffee Week#3 lebih bagus dibanding tahun lalu. Tidak hanya itu adanya kegiatan talk show, entertainment, workshop dan kompetisi yang dihadiri oleh juri-juri dan para master kopi juara dan berprestasi nasional dan internasional menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat," jelas

Ketua Panitia sekaligus CEO PT Medialink Internasional, Rahadi Saptata Abra, di JEC, Selasa (5/9).

Rahadi Saptata Abra mengatakan, tingginya antusiasme masyarakat dalam ajang JCW#3 menjadikan pihaknya bertekad untuk menjadikan Jogja Coffee Week sebagai agenda tahunan kebanggaan Yogyakarta, seperti yang diharapkan oleh Ketua Umum Kadin DIY dan Asek Perekonomian dan Pembangunan Setda DIY saat acara pembukaan.

"Target kami dalam ajang JCW ini lebih untuk mempertemukan para petani kopi, pengrajin. Roastery, alat-alat, mesin kopi, packaging, kedai kopi, cafe shop, pairing coffee, sistem kasir, digital marketing. Serta sistem HRD, jaringan internet, hingga bagi para calon pengusaha kopi sampai para penikmat kopi," terangnya. (Ria)-f